



INDIKATOR STRATEGIS

KABUPATEN BULUNGAN



2024



BAPPEDA DAN LITBANG
KABUPATEN BULUNGAN



INDIKATOR STRATEGIS

KABUPATEN BULUNGAN



2024



BAPPEDA DAN LITBANG
KABUPATEN BULUNGAN

Indikator Strategis Kabupaten Bulungan Tahun 2024

Ukuran Buku: 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman: x + 48 halaman

Penyusun Naskah: Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan

Penyunting: Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan

Desain Kover: Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan

Dicetak Oleh: Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan

Diterbitkan oleh: ©Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan.

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Publikasi Indikator Strategis Kabupaten Bulungan Tahun 2024 dapat diterbitkan. Publikasi ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran sampai sejauh mana capaian indikator-indikator strategis selama pembangunan tahun 2023. Indikator-indikator yang terangkum diharapkan berfungsi sebagai input dalam perencanaan daerah.

Publikasi ini menyajikan data yang dikumpulkan langsung oleh Badan Pusat Statistik (Data Primer) dan data yang berasal dari sumber lain (Data Sekunder). Informasi dasar yang disajikan meliputi lima indikator makro ekonomi yakni Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harga untuk perbaikan publikasi yang akan datang. Kepada semua pihak yang telah terlibat hingga publikasi ini dapat diterbitkan kami ucapkan terima kasih. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat terutama dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Bulungan.

Tanjung Selor, Oktober 2024
Kepala Bappeda dan Litbang
Kabupaten Bulungan

Ir. Iwan Sugiyanta, ST., MT.

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar.....	ix
1. Pertumbuhan Ekonomi.....	1
A. Kondisi Perekonomian Kabupaten Bulungan Tahun 2019-2023.....	3
B. PDRB Per Kapita.....	8
C. Kondisi PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara.....	8
2. Kemiskinan dan Ketimpangan.....	11
A. Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Bulungan.....	13
B. Kondisi Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bulungan.....	14
C. Ketimpangan Pengeluaran di Kabupaten Bulungan.....	15
D. Perbandingan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara.....	16
3. Indeks Pembangunan Manusia.....	19
A. Hakikat Pembangunan Manusia.....	21
B. Kondisi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bulunga Tahun 2023.....	22
C. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Utara.....	25
4. Ketenagakerjaan dan Pengangguran.....	27
A. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja.....	29
B. Karakteristik Penduduk Yang Bekerja.....	31
C. Karakteristik Pengangguran.....	33
D. Perbandingan Tingkat Pengangguran di Provinsi Kalimantan Utara.....	34
5. Perkembangan Indeks Harga Konsumen.....	37
A. Indeks Harga Konsumen (IHK).....	39
B. Perkembangan Indeks Harga Konsumen di Tanjung Selor Tahun 2023.....	40
C. Perbandingan Indeks Harga Konsumen Antar Kota.....	47

Daftar Tabel

Halaman

1. Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 1.1	Kondisi PDRB Kabupaten Bulungan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023	4
Tabel 1.2	Kondisi PDRB Kabupaten Bulungan Menurut Pengeluaran Tahun 2023...	7
Tabel 1.3	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Kabupaten Bulungan Tahun 2019-2023	9
Tabel 1.4	Kondisi PDRB Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara Tahun 2023	10

2. Kemiskinan dan Ketimpangan

Tabel 2.1	Kondisi Kemiskinan dan Ketimpangan Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara Tahun 2023.....	16
-----------	---	----

3. Indeks Pembangunan Manusia

Tabel 3.1	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara Tahun 2022-2023	25
Tabel 3.2	Komponen Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara Tahun 2022-2023	26

4. Ketenagakerjaan dan Pengangguran

Tabel 4.1	Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Kabupaten Bulungan, Agustus 2021-Agustus 2023.....	30
Tabel 4.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Bulungan, Agustus 2021-Agustus 2023.....	30
Tabel 4.3	Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara Tahun 2023	34

5. Perkembangan Indeks Harga Konsumen

Tabel 5.1	Infasi dan Andil Menurut Kelompok Pengeluaran Kota Tanjung Selor, 2023	41
-----------	--	----

Daftar Gambar

Halaman

1. Pertumbuhan Ekonomi

Gambar 1.1	Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bulungan Menurut ADHB dan ADHK, 2019-2023 (Triliun Rupiah).....	3
------------	--	---

2. Kemiskinan dan Ketimpangan

Gambar 2.1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bulungan, Maret 2019-Maret 2023.....	13
Gambar 2.2	Garis Kemiskinan Kabupaten Bulungan (Rupiah/Kapita/Bulan), Maret 2019-Maret 2023.....	14
Gambar 2.3	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bulungan, Maret 2019-Maret 2023.....	15
Gambar 2.4	Gini Ratio Kabupaten Bulungan, 2019-2023.....	21

3. Indeks Pembangunan Manusia

Gambar 3.1	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bulungan, 2020-2023.....	22
Gambar 3.2	Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Bulungan, 2020-2023 (Tahun).....	23
Gambar 3.3	Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Bulungan, 2020-2023 (Tahun).....	24
Gambar 3.4	Perkembangan Pengeluaran Perkapita Kabupaten Bulungan, 2020-2023 (Ribu Rupiah).....	24

4. Ketenagakerjaan dan Pengangguran

Gambar 4.1	Diagram Ketenagakerjaan.....	29
Gambar 4.2	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama di Kabupaten Bulungan (persen), Agustus 2021-Agustus 2023.....	31
Gambar 4.3	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Bulungan (persen), Agustus 2021-Agustus 2023.....	32
Gambar 4.4	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Kegiatan Formal/Informal di Kabupaten Bulungan (persen), Agustus 2021-Agustus 2023.....	32
Gambar 4.5	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Bulungan, Agustus 2021-Agustus 2023.....	33
Gambar 4.6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bulungan (persen), Agustus 2021-Agustus 2023.....	33

Daftar Gambar

Halaman

Gambar 4.7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Bulungan (persen), Agustus 2021-Agustus 2023	34
------------	---	----

5. Perkembangan Indeks Harga Konsumen

Gambar 5.1	Perkembangan Inflasi Bulanan Kota Tanjung Selor Tahun 2023 (persen)	40
Gambar 5.2	Inflasi Bulanan Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau Kota Tanjung Selor, Januari - Desember 2023 (persen)	42
Gambar 5.3	Inflasi Bulanan Kelompok Pakaian dan Alas Kaki Kota Tanjung Selor, Januari - Desember 2023 (persen).....	43
Gambar 5.4	Inflasi Bulanan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga Kota Tanjung Selor, Januari - Desember 2023 (persen)	43
Gambar 5.5	Inflasi Bulanan Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga Kota Tanjung Selor, Januari - Desember 2023 (persen).....	44
Gambar 5.6	Inflasi Bulanan Kelompok Kesehatan Kota Tanjung Selor, Januari - Desember 2023 (persen).....	44
Gambar 5.7	Inflasi Bulanan Kelompok Transportasi Kota Tanjung Selor, Januari - Desember 2023 (persen).....	45
Gambar 5.8	Inflasi Bulanan Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan Kota Tanjung Selor, Januari - Desember 2023 (persen).....	45
Gambar 5.9	Inflasi Bulanan Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya Kota Tanjung Selor, Januari - Desember 2023 (persen)	46
Gambar 5.10	Inflasi Bulanan Kelompok Pendidikan Kota Tanjung Selor, Januari - Desember 2023 (persen).....	46
Gambar 5.11	Inflasi Bulanan Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran Kota Tanjung Selor, Januari - Desember 2023 (persen).....	46
Gambar 5.12	Inflasi Bulanan Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya Kota Tanjung Selor, Januari - Desember 2023 (persen)	47



1

Pertumbuhan Ekonomi

A photograph of a dirt path lined with palm trees in a plantation. The path is made of gravel and dirt, and the palm trees are lush green. The sky is visible through the canopy of the trees.

“

Hampir setengah dari total PDRB Kabupaten Bulungan disumbang oleh sektor “Pertambangan dan Penggalian” serta “Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan”.

”

Pertumbuhan Ekonomi

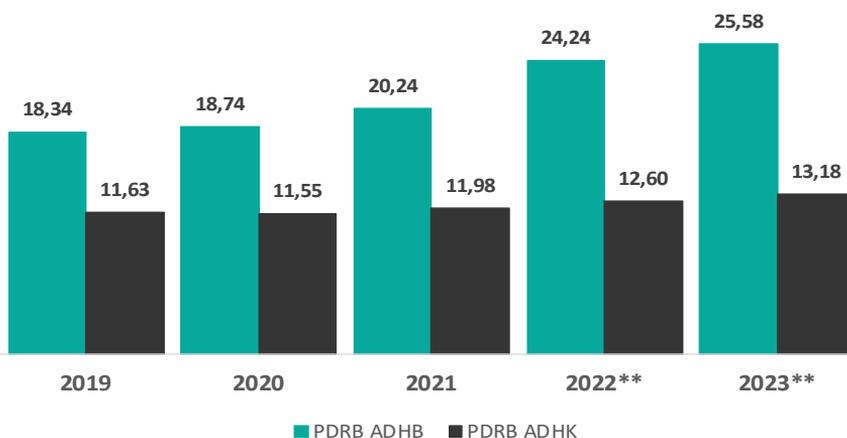
A. Kondisi Perekonomian Kabupaten Bulungan Tahun 2019-2023

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Dalam lima tahun terakhir, PDRB Kabupaten Bulungan cenderung mengalami pertumbuhan sekitar empat hingga lima persen setiap tahunnya. Namun, pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi cenderung bergerak ke arah negatif yang menyebabkan perekonomian berkontraksi hingga -0,70 persen. Hal ini dipengaruhi oleh adanya pembatasan aktivitas ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19. Seiring dengan menurunnya kasus Covid-19, kegiatan ekonomi secara perlahan membaik. Hal ini terlihat pada pertumbuhan ekonomi yang mulai kembali meningkat pada tahun 2021 sekitar 3,95 persen dan terus membaik hingga pada tahun 2023 yang mencapai 4,60 persen.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Bulungan pada tahun 2023 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Bulungan atas dasar harga konstan pada tahun 2023, mencapai 13,18 triliun rupiah, naik sebesar 0,58 triliun rupiah dari 12,60 triliun rupiah. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2023 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,60 persen.

Gambar 1.1 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bulungan Menurut ADHB dan ADHK, 2019-2023 (Triliun Rupiah)



Keterangan :

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik

Sedangkan, jika dilihat atas dasar harga berlaku nilai PDRB Kabupaten Bulungan pada tahun 2023 mencapai 25,58 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 1,34 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 24,24 triliun rupiah. Kenaikan nilai PDRB atas dasar harga berlaku ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan produksi di beberapa lapangan usaha dan adanya pengaruh inflasi.

Semua lapangan usaha ekonomi tahun 2023 mengalami pertumbuhan yang positif. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi selama tahun 2023 antara lain: Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 20,64 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 13,33 persen; dan Konstruksi sebesar 11,82 persen. Pertumbuhan ketiga lapangan usaha ini cenderung tinggi di antara lapangan usaha lain yang hanya tumbuh dibawah sembilan persen. Sementara itu, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan terendah selama tahun 2023 adalah Industri Pengolahan sebesar 0,89 persen.

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa

Tabel 1.1 Kondisi PDRB Kabupaten Bulungan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023

Lapangan Usaha	PDRB ADHB (Juta Rp)	PDRB ADHK (2010=100) (Juta Rp)	Laju Pertumbuhan (Persen)	Distribusi (Persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.733.879	2.146.333	2,66	14,60
B Pertambangan dan Penggalian	7.942.342	3.634.617	3,80	31,05
C Industri Pengolahan	3.117.380	1.556.183	0,89	12,42
D Pengadaan Listrik dan Gas	11.424	8.042	20,46	0,04
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16.089	11.163	5,02	0,06
F Konstruksi	3.064.659	1.525.130	11,82	11,98
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.057.848	1.170.790	6,11	8,05
H Transportasi dan Pergudangan	1.209.558	606.661	5,13	4,73
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	354.728	177.925	8,45	1,39
J Informasi dan Komunikasi	662.595	459.836	5,28	2,59
K Jasa Keuangan dan Asuransi	230.580	124.306	13,33	0,90
L Real Estat	229.534	171.746	3,44	0,90
MN Jasa Perusahaan	27.484	15.234	5,15	0,11
O Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial	1.562.266	812.282	3,10	6,11
P Jasa Pendidikan	865.055	506.530	4,95	3,38
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	204.151	125.920	1,97	0,80
RSTU Jasa Lainnya	228.123	125.794	6,63	0,89
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	25.577.696	13.178.492	4,60	100,00

Catatan: Angka PDRB Tahun 2023 masih bersifat sangat sementara
 Sumber: Badan Pusat Statistik

sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha.

Dalam lima tahun terakhir, struktur perekonomian Kabupaten Bulungan didominasi oleh lima kategori lapangan usaha, di antaranya: Pertambangan dan Penggalian; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; Konstruksi; dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor. Bahkan dengan kondisi pasca pandemi Covid-19, struktur perekonomian di Kabupaten Bulungan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini tergambar dari peranan masing-masing lapangan usaha penyusun PDRB Kabupaten Bulungan yang tidak mengalami perubahan yang besar selama pandemi Covid-19.

Sebagai daerah dengan kekayaan akan batu bara yang melimpah, Kabupaten Bulungan berhasil memanfaatkan sumber daya ini menjadi salah satu kontributor yang mendominasi struktur PDRB. Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian menyumbang sekitar 31,05 persen terhadap total PDRB Kabupaten Bulungan pada tahun 2023 atau sekitar 7,94 triliun rupiah.

Pada tahun 2020 saat pandemi Covid-19 sempat menyebabkan berkurangnya produktivitas perusahaan batubara yang mengakibatkan produksi batubara menjadi turun. Pembatasan akses keluar masuk antar daerah juga menyebabkan turunnya permintaan ekspor untuk komoditas pertambangan, ditambahkan dengan turunnya harga batubara acuan secara global.

Akan tetapi, pada tahun 2021 kondisi berangsur-angsur membaik hingga saat ini. Batubara mulai mengalami peningkatan produksi, diiringi dengan peningkatan harga acuan batubara. Selain itu, harga minyak mentah juga mengalami peningkatan dan peningkatan tersebut berlanjut hingga tahun 2023. Sehingga keadaan ini mengakibatkan pertumbuhan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian meningkat hingga 3,80 persen pada tahun 2023.

Lapangan usaha yang berkontribusi terhadap PDRB tertinggi kedua setelah Pertambangan dan Penggalian adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Kontribusi kategori ini terhadap PDRB Kabupaten Bulungan pada tahun 2023 atas dasar harga berlaku mencapai 14,60 persen atau sebesar 3,73 triliun rupiah. Pertumbuhan ekonomi pada kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir, kecuali pada tahun 2021 yang sempat mengalami perlambatan. Pada tahun 2019 tercatat laju pertumbuhan kategori ini sebesar 3,71 persen kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 4,01 persen kemudian melambat menjadi 2,82 persen pada tahun 2021. Namun pada tahun 2022 pertumbuhannya kembali meningkat menjadi 4,48 persen dan kembali melambat menjadi 2,66 persen pada tahun 2023.

Hal ini membuktikan bahwa kategori ini yang mencakup tiga subkategori yakni subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian; subkategori Kehutanan dan Penebangan Kayu; serta subkategori Perikanan dapat terus mendorong perekonomian Kabupaten Bulungan.

Selanjutnya, lapangan usaha ketiga terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bulungan adalah Industri Pengolahan. Secara nominal, Industri Pengolahan berkembang dari 2,55 triliun rupiah menjadi 3,12 triliun rupiah selama lima tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi pada kategori ini cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir.

Aktivitas industri pengolahan tumbuh sebesar 0,89 persen pada tahun 2023. Peningkatan ini terjadi seiring dengan peningkatan produktivitas dan peningkatan permintaan produk dari masyarakat dikarenakan mulai kembali diselenggarakannya berbagai acara yang sempat dibatasi pada dua tahun terakhir akibat pandemi Covid-19. Selain itu, seiring dengan

bertambahnya jumlah penduduk, konsumsi masyarakat juga mengalami peningkatan. Hal ini mendorong munculnya berbagai Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di berbagai bidang untuk mencukupi permintaan pasar yang semakin meningkat.

Sebagai wilayah yang terus melakukan pembangunan di berbagai bidang, Kabupaten Bulungan gencar memperbaiki fasilitas dan infrastruktur untuk masyarakat. Hal ini tercermin dari kategori Konstruksi sebagai penyumbang terbesar keempat untuk PDRB Kabupaten Bulungan. Pada tahun 2023, kontribusi kategori Konstruksi mencapai 3,06 triliun rupiah atau sebesar 11,98 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Bulungan. Angka tersebut meningkat dibandingkan pada tahun 2022 yang sebesar 2,65 triliun rupiah. Pada tahun 2023, kategori Konstruksi mengalami pertumbuhan sebesar 11,82 persen yang merupakan pertumbuhan terbesar ketiga dari seluruh kategori lapangan usaha.

Dengan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan kategori Konstruksi di Kabupaten Bulungan cenderung berfluktuasi. Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebagai efek pembangunan fasilitas dan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengingat status Tanjung Selor sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu, adanya pembangunan kawasan industri di Kecamatan Tanjung Palas Timur mendukung peningkatan pada kategori ini.

Selama lima tahun terakhir, kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang lebih dari 7 persen terhadap total PDRB, peringkat kelima kategori dengan kontribusi terbesar. Pada tahun 2023, kontribusi kategori ini mencapai 2,06 triliun rupiah atau sekitar 8,05 persen terhadap perekonomian di Kabupaten Bulungan.

Secara umum, aktivitas Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor cenderung stabil selama periode 2019-2023 dengan peningkatan kontribusi dan pertumbuhan yang selalu positif setiap tahunnya. Namun, pada tahun 2023 pertumbuhan kategori ini cenderung melambat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya meskipun kontribusinya tetap meningkat. Pada tahun 2020 laju pertumbuhan kategori ini hanya sebesar 1,18 persen. Salah satu penyebabnya adalah penurunan daya beli masyarakat dan penurunan konsumsi rumah tangga sebagai akibat dari adanya pandemi Covid-19. Akan tetapi, kondisi tersebut cenderung membaik pada tahun 2021 sehingga pertumbuhannya dapat mencapai 6,81 persen dan pertumbuhannya meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar 8,58 persen, kategori dengan pertumbuhan tertinggi ketiga pada tahun 2022. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan perbaikan fasilitas publik oleh Pemerintah Daerah, mendukung munculnya berbagai toko dan minimarket di Kabupaten Bulungan sehingga mampu meningkatkan daya beli masyarakat.

Pada tahun 2022, laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yakni sebesar 10,70 persen, satu-satunya kategori dengan pertumbuhan diatas sepuluh persen yang dipengaruhi oleh meningkatnya kunjungan hotel/penginapan dan jumlah usaha penyediaan makanan seperti restoran, kafe, maupun warung/kedai.

Namun, pada tahun 2023, laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada kategori Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 20,46 persen. Laju pertumbuhan ini sangat tinggi mengingat laju pertumbuhan pada kategori lainnya mayoritas hanya berkisar di bawah sepuluh persen. Meskipun jika dilihat proporsinya terhadap total PDRB yang hanya 0,04 persen, kategori dengan penyumbang PDRB terendah di Kabupaten Bulungan, kategori Pengadaan Listrik dan Gas mampu tumbuh pesat mengalahkan kategori penyumbang PDRB terbesar sekalipun. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Bulungan sebagai pengaruh upaya pemerintah Kabupaten Bulungan dalam mengalirkan listrik ke desa-desa

yang sebelumnya belum pernah teraliri listrik. Kategori ini mampu berkontribusi sebesar 11,42 miliar rupiah terhadap PDRB Kabupaten Bulungan Tahun 2023.

Tabel 1.2 Kondisi PDRB Kabupaten Bulungan Menurut Pengeluaran Tahun 2023

Komponen Pengeluaran	PDRB ADHB (Miliar Rp)	PDRB ADHK (2010=100) (Miliar Rp)	Laju Pertumbuhan (Persen)	Distribusi (Persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4.308,96	2.393,36	5,91	16,85
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	179,50	96,44	10,53	0,70
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.740,18	1.371,40	8,93	10,71
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	12.715,95	6.484,53	9,20	49,71
5 Perubahan Inventori	28,87	13,20	-	0,11
6 Net Ekspor	5.604,24	2.819,57	-	21,91
Produk Domestik Regional Bruto	25.577,70	13.178,49	4,60	100,00

Catatan: Angka PDRB Tahun 2023 masih bersifat sangat sementara
Sumber: Badan Pusat Statistik

Selain menurut pendekatan produksi, perekonomian juga dapat dihitung menurut pendekatan pengeluaran. Secara konsep, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai akhir yang sama namun hanya komponen penyusunnya saja yang berbeda.

Sebagai ibukota provinsi, penduduk Kabupaten Bulungan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun karena masuknya pendatang dari berbagai wilayah. Masuknya pendatang ini tentunya membawa pengaruh positif terhadap jumlah industri dan perdagangan, penyediaan akomodasi, maupun penyediaan makan minum. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah terutama di kawasan Tanjung Selor juga membantu mendorong nilai pengeluaran pemerintah dan pembentukan modal tetap bruto.

Pertambahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2019 jumlah penduduk Bulungan sebanyak hampir 133 ribu jiwa kemudian pada tahun 2023 menjadi sekitar 158 ribu jiwa telah menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya konsumsi rumah tangga sebagai faktor pembentuk PDRB menurut pengeluaran setiap tahunnya. Pada tahun 2019 peran komponen konsumsi rumah tangga sekitar 18,83 persen terhadap total PDRB menurut pengeluaran dan menjadi 16,85 persen pada tahun 2023. Akan tetapi pertumbuhan ekonomi daerah yang didorong oleh konsumsi sulit dijaga keberlangsungan dan kestabilannya dan kurang menciptakan nilai tambah dan memicu peningkatan inflasi oleh karena kenaikan harga-harga. Kontribusi ekspor neto juga cukup fluktuatif setiap tahunnya karena dipengaruhi oleh komoditas ekspor dan impor yang cukup beragam. Pada tahun 2018 kontribusinya sebesar 13,44 persen menjadi 21,91 persen pada tahun 2023. Hal tersebut dapat mengindikasikan kekuatan ekspor komoditas ke luar Bulungan meningkat baik ke luar negeri maupun ke luar wilayah Bulungan. Hal ini juga dapat mengindikasikan berkurangnya impor komoditas ke dalam wilayah Bulungan.

Peningkatan investasi akan menciptakan dampak pengganda yang dapat mendorong pemanfaatan sumber daya lebih optimal pada kegiatan produksi mendorong perdagangan

antar daerah dan menciptakan nilai tambah yang lebih besar. Percepatan ini juga bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah. Hal ini kemudian dapat mendorong pendapatan masyarakat hingga meningkatkan daya beli masyarakat khususnya untuk melakukan konsumsi.

Bagi tenaga kerja, dorongan kegiatan ekonomi melalui investasi dan perdagangan dapat mengurangi pengangguran dan memperbaiki upah yang mereka terima. Kenaikan upah diharapkan tidak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi tetapi juga meningkatkan kemampuan menabung dan/atau berinvestasi. Bagi pemerintah, meningkatnya aktivitas produksi dan perdagangan, upah serta daya beli berarti meningkatnya penerimaan pajak yang memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Peran investasi (komponen pembentukan modal domestik bruto - PMTB) masih dominan di Kabupaten Bulungan karena pembangunan di berbagai sektor baik pemerintahan maupun swasta masih terus berlanjut. Pada tahun 2019 peran PMTB 55,31 persen terhadap total PDRB yang kemudian terus mengalami fluktuasi dan menjadi sebesar 49,71 persen pada tahun 2023. Pertumbuhan komponen PMTB dengan proporsi komponen yang cukup besar terhadap total PDRB menurut pengeluaran memberikan gambaran bahwa wilayah Kabupaten Bulungan masih cukup menarik untuk dilakukan investasi baik oleh sektor pemerintah maupun swasta. Investasi dan pembangunan ini berupa aset bangunan dan non bangunan. Setelah sempat terhambat pada tahun 2020 dengan nilai pertumbuhan komponen PMTB pada PDRB menurut pengeluaran Kabupaten Bulungan yang bernilai negatif atau terkontraksi, pada tahun selanjutnya komponen PMTB mulai tumbuh kembali. Kepercayaan investor untuk berinvestasi di wilayah Bulungan meningkat kembali, ditambah lagi dengan adanya pembangunan berbagai proyek strategis nasional.

B. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kesejahteraan suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan memengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita per tahun Kabupaten Bulungan atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 tercatat sebesar 161,83 juta rupiah, meningkat dari tahun 2022 yang hanya sebesar 155,55 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita ini masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Jika dilihat dengan menghilangkan faktor inflasi, secara nominal nilai PDRB per kapita juga mengalami peningkatan dari tahun 2022 sekitar 80,86 juta rupiah menjadi 83,38 juta rupiah pada tahun 2023. Kenaikan ini tak lepas dari pengaruh dari kenaikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulungan yang mampu tumbuh searah dengan bertambahnya jumlah penduduk.

C. Kondisi PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara

Dinamika ekonomi Indonesia tidak bisa terlepas dari ekonomi global dan regional. Pada tahun 2020, dalam kawasan Asia khususnya Asia Tenggara, kemerosotan ekonomi dialami oleh semua negara. Kalimantan Utara sebagai provinsi perbatasan dengan Malaysia, baik secara langsung maupun tidak langsung telah terkena imbas perekonomian Malaysia. Namun, perlahan-lahan perekonomian dunia termasuk Indonesia kembali pulih, dimana hal ini juga

Tabel 1.3 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Kabupaten Bulungan 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Triliun Rupiah)					
• Atas Dasar Harga Berlaku	18,34	18,74	20,24	24,24	25,58
• Atas Dasar Harga Konstan	11,63	11,55	11,98	12,60	13,18
PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)					
• Atas Dasar Harga Berlaku	137,75	123,79	131,81	155,55	161,83
• Atas Dasar Harga Konstan	87,32	76,29	78,02	80,86	83,38
Pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	9,19	-12,64	2,26	3,64	3,12
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	133,17	151,36	153,56	155,82	158,05
Pertumbuhan Jumlah Penduduk	-4,11	13,66	1,45	1,48	1,43

Catatan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik

berdampak pada perekonomian Kalimantan Utara.

Distribusi PDRB per Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara selama lima tahun terakhir tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pada tahun 2023, Kabupaten Bulungan menyumbang sekitar 17,32 persen terhadap perekonomian Kalimantan Utara, terbesar ketiga setelah Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan. Kota Tarakan selalu menjadi kota dengan distribusi PDRB terbesar di Provinsi Kalimantan Utara dengan 35,27 persen atau sekitar 52,08 triliun rupiah pada tahun 2023. Kemudian disusul oleh Kabupaten Nunukan sebesar 42,53 triliun rupiah atau 28,80 persen. Kabupaten Malinau berkontribusi terhadap perekonomian Kalimantan Utara sebesar 18,44 triliun rupiah atau 12,49 persen dan Kabupaten Tana Tidung sebesar 9,02 triliun rupiah atau 6,11 persen.

Namun, jika dilihat dari laju pertumbuhannya seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara tumbuh diatas empat persen. Kota Tarakan menjadi wilayah dengan laju pertumbuhan tertinggi di Kalimantan Utara dengan 5,90 persen. Kemudian Kabupaten Bulungan tertinggi kedua dengan 4,60 persen, diikuti oleh Kabupaten Tana Tidung sebesar 4,30 persen, Kabupaten Malinau sebesar 4,18 persen, dan Kabupaten Nunukan sebesar 4,16 persen.

Keragaman potensi kekayaan alam Kalimantan Utara tidak dapat dipungkiri. Provinsi ini menyimpan begitu banyak kekhasan baik dari segara kontur wilayah, iklim hingga sumber daya alam yang dimiliki. Keragaman tersebut menyebabkan adanya perbedaan sasaran kebijakan untuk masing-masing kabupaten/kota sehingga perlu adanya analisis mendalam terkait karakteristik setiap daerah tersebut.

Pada sebagian besar kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Utara, kategori Pertambangan dan Penggalian; dan kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menjadi penyumbang terbesar perekonomian di wilayahnya. Di Kabupaten Bulungan, kedua kategori tersebut menjadi dua kategori dengan sumbangan terbesar terhadap perekonomian, diikuti dengan kategori Industri Pengolahan.

Di Kabupaten Malinau, struktur perekonomiannya sedikit berbeda karena kontribusi kategori

Tabel 1.4 Kondisi PDRB Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara Tahun 2023

Kabupaten/Kota		PDRB ADHB (Triliun Rp)	PDRB ADHK (2010=100) (Triliun Rp)	Laju Pertumbuhan (Persen)	Distribusi (Persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Kabupaten Malinau	18,44	8,93	4,18	12,49
2	Kabupaten Bulungan	25,58	13,18	4,60	17,32
3	Kabupaten Tana Tidung	9,02	4,18	4,30	6,11
4	Kabupaten Nunukan	42,53	17,91	4,16	28,80
5	Kota Tarakan	52,08	25,65	5,90	35,27
Jumlah 5 Kabupaten/Kota		147,65	69,84	4,89	100,00
Provinsi Kalimantan Utara		147,28	69,82	4,94	100,00

Catatan: Angka PDRB Tahun 2023 masih bersifat sangat sementara
 Sumber: Badan Pusat Statistik

Pertambangan dan Penggalian sangat mendominasi yakni sekitar 60,51 persen, diikuti oleh kategori Konstruksi sebesar 11,94 persen, dan kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 8,61 persen.

Lain halnya di Kabupaten Tana Tidung, kategori Pertambangan dan Penggalian masih menjadi penyumbang terbesar terhadap PDRB yakni sebesar 44,54 persen, diikuti oleh kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 23,10 persen, dan kategori Konstruksi sebesar 14,94 persen.

Jika di Kabupaten Nunukan, struktur PDRBnya sama dengan struktur Kabupaten Bulungan dengan penyumbang terbesar masih bersumber dari kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar 57,63 persen dan kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 18,08 persen. Namun, untuk kontribusi terbesar ketiga yakni kategori Konstruksi sebesar 6,10 persen.

Sebagai satu-satunya wilayah dengan status Kota, struktur perekonomian Kota Tarakan bereda dengan daerah lainnya. Penyumbang terbesar terhadap total PDRBnya adalah kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 24,40 persen. Kemudian diikuti oleh kategori Konstruksi 15,35 persen dan kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,06 persen.



2

Kemiskinan dan Ketimpangan



“

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Bulungan tahun 2023 menurun dibandingkan tahun 2022, namun masih menjadi yang tertinggi di wilayah Kalimantan Utara.

”

Kemiskinan dan Ketimpangan

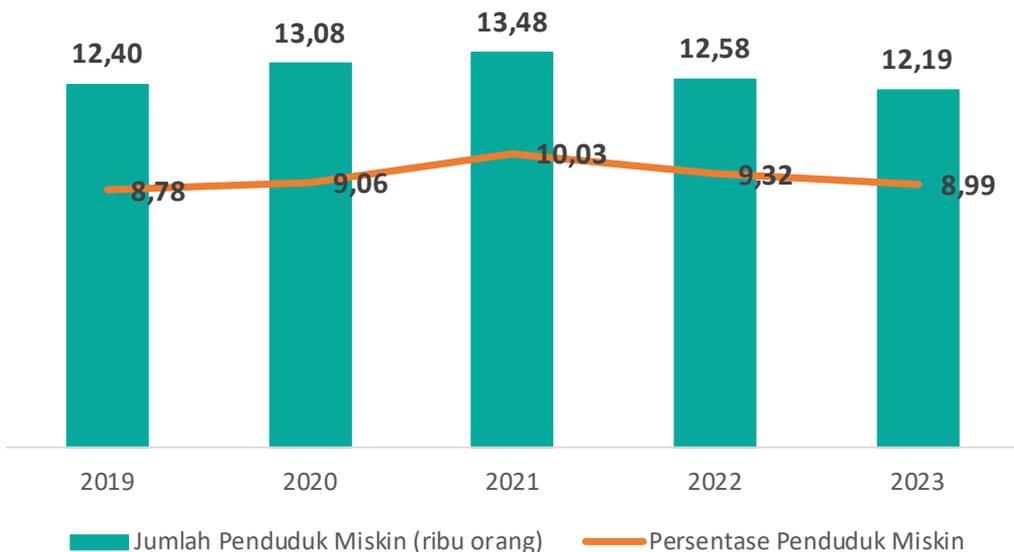
A. Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Bulungan

Hampir di setiap daerah, kemiskinan masih menjadi masalah yang penting, tidak terkecuali di Kabupaten Bulungan. Pengentasan kemiskinan masih menjadi tema pembangunan, agenda utama, dan berkelanjutan di seluruh dunia termasuk Indonesia. Dalam *Outcome Document Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development*, mengakhiri kemiskinan juga menjadi tujuan pertama dari tujuh belas tujuan yang disepakati dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Selain itu, dalam RPJMN 2020-2024, strategi pengurangan tingkat kemiskinan juga menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional.

Pengukuran kemiskinan dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan untuk memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Apalagi untuk ekonomi Indonesia yang pernah mengalami guncangan akibat pandemi Covid-19, tentu berdampak pada kesejahteraan penduduk baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan. Garis kemiskinan mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Penduduk dikatakan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan.

Gambar 2.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bulungan, Maret 2019-Maret 2023



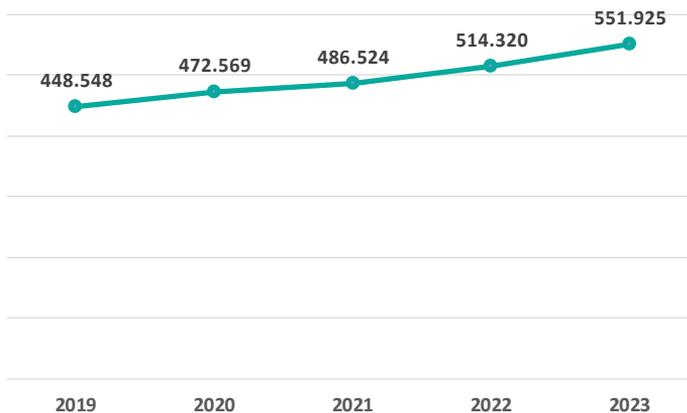
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret

Secara umum, dalam lima tahun terakhir, tingkat kemiskinan Kabupaten Bulungan mengalami fluktuasi, baik dari sisi jumlah maupun persentase. Pada Maret 2021, jumlah penduduk miskin Kabupaten Bulungan sebesar 13,48 ribu orang atau sekitar 10,03 persen, bertambah sekitar 400 orang dibandingkan Maret 2020. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19. Namun, seiring dengan penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan kinerja ekonomi, jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Bulungan mengalami penurunan. Hal ini dapat terlihat pada Maret 2023 bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bulungan sebanyak 12,19 ribu orang atau sekitar 8,99 persen, berkurang sekitar 390 orang dibandingkan kondisi Maret 2022.

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Garis kemiskinan Kabupaten Bulungan Maret 2023 sebesar Rp551.925,- per kapita per bulan. Jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2022, garis kemiskinan ini meningkat sebesar 7,31 persen. Perkembangan garis kemiskinan Kabupaten Bulungan dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.2 Garis Kemiskinan Kabupaten Bulungan (Rupiah/Kapita/Bulan), Maret 2019-Maret 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret

B. Kondisi Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bulungan

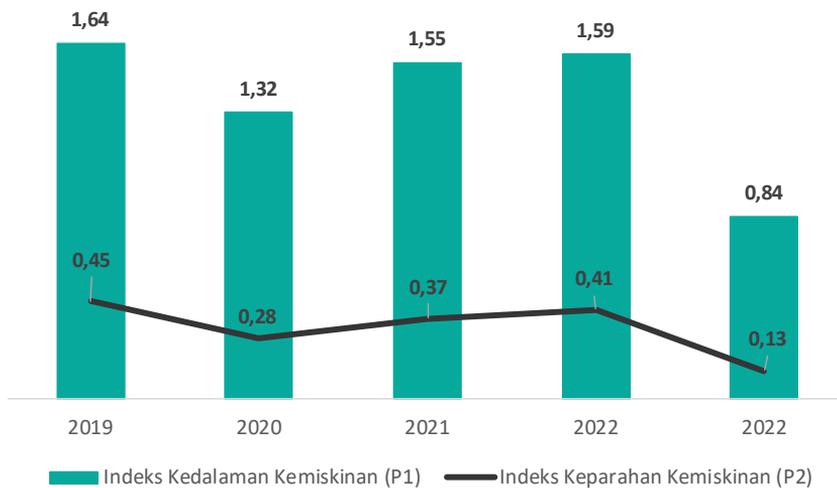
Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan berarti semakin jauh pula rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai Indeks Keparahan Kemiskinan, maka semakin tinggi pula ketimpangan pengeluarandi antara penduduk miskin.

Pada periode Maret 2022-Maret 2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks

Keparahan Kemiskinan (P_2) Kabupaten Bulungan mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan Maret 2023 sebesar 0,84, menurun jika dibandingkan Maret 2022 yang sebesar 1,59. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan Maret 2023 sebesar 0,13, menurun jika dibandingkan dengan Maret 2022 yang sebesar 0,41.

Penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Maret 2023 mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin kecil jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Gambar 2.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bulungan, Maret 2019 - Maret 2023

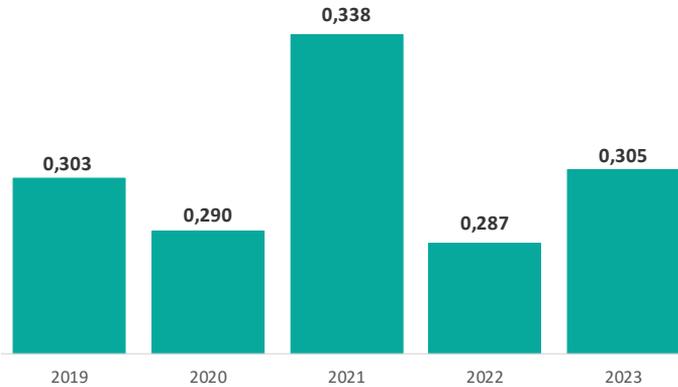


Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret

C. Ketimpangan Pengeluaran di Kabupaten Bulungan

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang penting untuk dilihat karena merupakan ukuran kemiskinan relatif. Namun, dikarenakan data pendapatan sulit diperoleh, pengukuran distribusi pendapatan didekati dengan menggunakan data pengeluaran. Ukuran yang menggambarkan ketidakmerataan pendapatan salah satunya adalah koefisien Gini (*Gini Ratio*).

Gini Ratio merupakan ukuran tingkat ketimpangan pendapatan penduduk yang banyak digunakan di berbagai negara. Perubahan Gini Ratio merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Semakin kecil nilai Gini Ratio menunjukkan distribusi pendapatan penduduk yang rata. Sebaliknya, semakin tinggi Gini Ratio menunjukkan distribusi pendapatan penduduk yang semakin timpang. Pada Maret 2023, angka Gini Ratio Kabupaten Bulungan meningkat dibandingkan kondisi Maret 2022 dari 0,287 menjadi 0,305. Peningkatan angka Gini Ratio dapat berarti bahwa distribusi pengeluaran penduduk semakin timpang dibandingkan dengan tahun lalu.

Gambar 2.4 Gini Ratio Kabupaten Bulungan, 2019-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik

D. Perbandingan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara

Di Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan menempati posisi tertinggi dengan persentase penduduk miskin sebesar 8,99 persen diikuti Kabupaten Malinau sebesar 6,54 persen, Kota Tarakan sebesar 6,10 persen, Kabupaten Nunukan sebesar 5,53 persen, dan Kabupaten Tana Tidung sebesar 4,62 persen.

Namun, jika dilihat dari jumlahnya, Kota Tarakan memiliki penduduk miskin terbanyak yakni sekitar 16,49 ribu orang, diikuti Kabupaten Bulungan sebanyak 12,19 ribu orang, Kabupaten Nunukan sebanyak 11,88 ribu orang, Kabupaten Malinau sebanyak 5,95 ribu orang, dan Kabupaten Tana Tidung sebanyak 1,47 ribu orang.

Gambar 2.5 Kondisi Kemiskinan dan Ketimpangan Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan	Garis Kemiskinan	Gini Ratio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Malinau	5,95	6,54	0,37	0,06	749.933	0,285
2 Bulungan	12,19	8,99	0,84	0,13	551.925	0,305
3 Tana Tidung	1,47	4,62	0,14	0,02	490.400	0,281
4 Nunukan	11,88	5,53	0,59	0,09	556.342	0,262
5 Tarakan	16,49	6,10	0,79	0,19	819.621	0,253
Kalimantan Utara	47,97	6,45	0,64	0,11	817.876	0,277

Sumber: Badan Pusat Statistik

Perbedaan kondisi wilayah, kebiasaan masyarakat lokal, serta taraf hidup di masing-masing daerah menyebabkan adanya perbedaan tingkat pemenuhan kebutuhan dasar yang tergambarkan dari garis kemiskinan yang berbeda-beda di setiap daerah. Secara umum, garis kemiskinan tertinggi di Kalimantan Utara berada di Kota Tarakan yang sebesar Rp 819.621 per kapita per bulan. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Malinau sebesar Rp 749.933, Kabupaten Nunukan sebesar Rp 556.342, Kabupaten Bulungan sebesar Rp 551.925, dan Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp 490.400.

Jika dilihat menurut kedalaman dan keparahan kemiskinan, Kabupaten Bulungan adalah daerah dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan tertinggi di Kalimantan Utara dengan nilai 0,84 poin. Angka ini cenderung membaik dari tahun lalu yang berada di atas satu poin. Adapun Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Malinau sebesar 0,37, Kabupaten Tana Tidung sebesar 0,14, Kabupaten Nunukan sebesar 0,59 dan Kota Tarakan sebesar 0,79. Sedangkan jika berdasarkan Indeks Keparahannya, Kota Tarakan menjadi wilayah dengan indeks tertinggi di Kalimantan Utara dengan nilai 0,19 menggantikan Kabupaten Bulungan pada tahun lalu. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Bulungan sebesar 0,13, Kabupaten Nunukan sebesar 0,09, Kabupaten Malinau sebesar 0,06, dan Kabupaten Tana Tidung sebesar 0,02.

Kondisi ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Kalimantan Utara dapat tercermin dari perbandingan Gini Rasio masing-masing wilayah. Kabupaten Bulungan adalah wilayah dengan ketimpangan tertinggi di Kalimantan Utara dengan Gini Rasio sebesar 0,305. Hal ini sejalan dengan nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan yang juga tertinggi di wilayah Kalimantan Utara. Adapun Gini Rasio kabupaten/kota lainnya antara lain Tana Tidung dengan nilai 0,281, Kota Tarakan dengan nilai 0,253, Kabupaten Nunukan dengan nilai 0,262, dan Kabupaten Malinau dengan nilai 0,285.



3

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)



“

IPM Kabupaten Bulungan meningkat menjadi 73,20 pada tahun 2023. Peringkat ketiga di Kalimantan Utara setelah Tarakan dan Malinau.

”

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

A. Hakikat Pembangunan Manusia

Pada era 1960-1970, pelaksanaan pembangunan selalu ditekankan pada pertumbuhan ekonomi (paradigma pembangunan). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diyakini akan membawa kemajuan pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi rata-rata lima persen per tahun untuk jangka panjang dipandang sebagai keberhasilan pembangunan. Sayangnya, penerapan paradigma pertumbuhan ini justru memunculkan berbagai masalah, antara lain kemiskinan dan pengangguran. Teori *trickle down effect* yang sebelumnya diharapkan mampu mengantisipasi masalah tersebut ternyata tidak bekerja. Manfaat pertumbuhan ekonomi tidak dapat menjangkau semua kalangan dan justru meningkatkan kesenjangan.

Adanya berbagai masalah yang timbul selanjutnya melahirkan paradigma baru, yaitu paradigma kesejahteraan. Walaupun demikian, dalam penerapannya masih terdapat berbagai persoalan yang berdampak pada masalah ketidakadilan dan ketidakterpaduan pembangunan.

Berkaca dari pemikiran-pemikiran sebelumnya, berkembanglah konsep pembangunan yang berkelanjutan dengan pendekatan pembangunan manusia. UNDP dalam Human Development Report 1990 menyebutkan bahwa manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini menegaskan pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir, sekaligus merupakan input pembangunan. Menganggap manusia sebagai aset bangsa yang sesungguhnya dan menciptakan pertumbuhan dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan menjadi ide dasar pembangunan manusia. Konsep inilah yang mendasari dibentuknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM terus menjadi indikator penting dalam mengukur kemajuan pembangunan manusia sejak pertama kali diperkenalkan oleh UNDP. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Hal inilah yang menjadi dasar pembentukan tiga dimensi dasar pembentuk IPM yakni umur panjang dan hidup sehat (kesehatan), pengetahuan (pendidikan), dan standar hidup layak (pengeluaran). Dimensi kesehatan dilihat menggunakan indikator angka harapan hidup saat lahir, dimensi pendidikan dilihat menggunakan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, sedangkan dimensi pengeluaran dilihat menggunakan indikator pengeluaran per kapita disesuaikan.

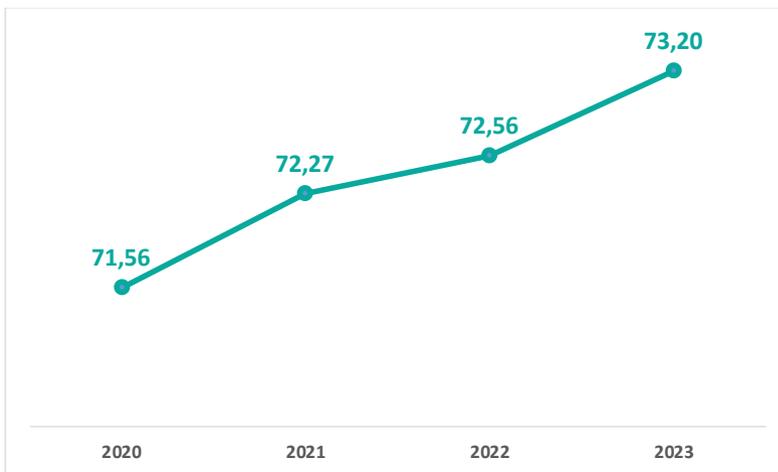
IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. UNDP membagi tingkatan status pembangunan manusia suatu wilayah ke dalam empat golongan yaitu sebagai berikut:

Sangat Tinggi	IPM \geq 80
Tinggi	70 \leq IPM < 80
Sedang	60 \leq IPM < 70
Rendah	IPM < 60

B. Kondisi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bulungan Tahun 2023

Pembangunan manusia di Kabupaten Bulungan terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2017, status perkembangan manusia Kabupaten Bulungan meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi”. Selama 2020-2023, IPM Kabupaten Bulungan meningkat sebesar 1,64 poin, dari 71,56 pada tahun 2020 menjadi 73,20 pada tahun 2023. Capaian IPM yang terus meningkat dari tahun ke tahun merupakan indikator positif bahwa kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Bulungan yang dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi juga semakin membaik. Hal ini juga dapat mengindikasikan bahwa kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah berhasil meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bulungan.

Gambar 3.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bulungan, 2020-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik

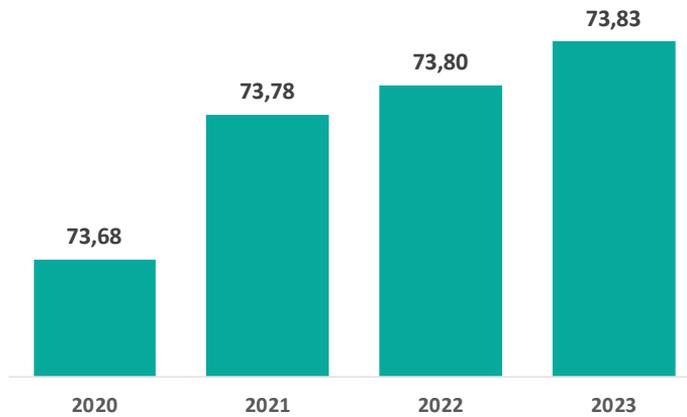
Merujuk pada RPJPD Kabupaten Bulungan 2010-2025, sesuai dengan salah satu misi Kabupaten Bulungan yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Imtaq), menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), serta sehat jasmani dan rohani, untuk mewujudkan tenaga kerja, pegawai negeri sipil (PNS) dan peran serta pihak swasta yang profesional sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan global, dapat dikatakan bahwa Kabupaten Bulungan telah meningkatkan kualitas pembangunan manusia secara bertahap untuk tercapainya misi tersebut.

Peningkatan IPM tahun 2023 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak. Seluruh indikator yang mewakili dimensi IPM mengalami pertumbuhan. Indikator Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan) tumbuh lebih tinggi dibandingkan indikator lainnya.

Dalam mengukur dimensi kesehatan, IPM menggunakan indikator Angka Harapan Hidup (AHH). Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan, khususnya di bidang kesehatan. Meningkatnya angka harapan hidup dapat diartikan adanya keberhasi

Berdasarkan komponen dimensi kesehatan, Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Bulungan selalu mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Semakin meningkatnya Angka Harapan Hidup di Kabupaten Bulungan mengindikasikan tingkat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bulungan semakin membaik. Selama periode 2020 hingga 2023, Kabupaten Bulungan telah berhasil meningkatkan usia harapan hidup saat lahir sebesar 0,15 tahun dari 73,68 tahun pada 2020 menjadi 73,83 tahun pada 2023. Nilai ini dapat diinterpretasikan bahwa secara rata-rata bayi yang baru lahir di Kabupaten Bulungan pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bertahan hidup sampai dengan usia 73,83 tahun.

Gambar 3.2 Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Bulungan, 2020-2023 (Tahun)



Sumber: Badan Pusat Statistik

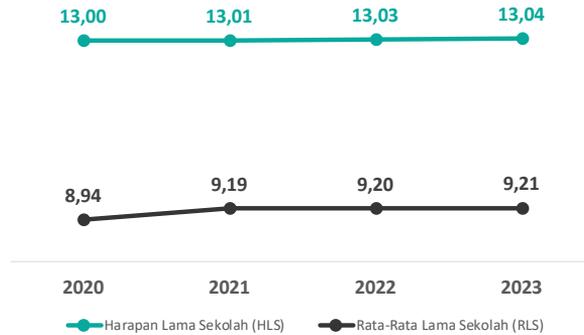
Dimensi pengetahuan pada IPM terbentuk oleh dua indikator, yaitu harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Penghitungan harapan lama sekolah mencakup pendidikan untuk penduduk yang berusia mulai dari tujuh tahun ke atas, sementara penghitungan rata-rata lama sekolah dari penduduk yang berusia 25 tahun ke atas. Angka harapan lama sekolah dapat digunakan untuk meninjau keberhasilan program pendidikan dalam jangka waktu pendek, sedangkan dalam jangka panjang dapat dilihat dari angka rata-rata lama sekolah. Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah dapat memberikan gambaran tentang capaian dan penambahan sumber daya manusia berkualitas pada suatu daerah.

Selama periode 2020 hingga 2023, harapan lama sekolah di Kabupaten Bulungan meningkat 0,04 tahun dari 13,00 tahun pada 2020 menjadi 13,04 tahun pada 2023. Hal ini dapat diartikan bahwa anak-anak usia tujuh tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus Diploma I. Meningkatnya harapan lama sekolah merupakan sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang dapat menikmati bangku sekolah dan semakin mudahnya mendapatkan fasilitas pendidikan yang dapat diakses oleh masyarakat.

Sementara itu, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bulungan meningkat 0,27 tahun dari 8,94 tahun pada 2020 menjadi 9,21 tahun pada 2023. Hal ini dapat diartikan bahwa secara rata-rata penduduk Kabupaten Bulungan usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga menamatkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sederajat. Setiap tahunnya indikator pada dimensi pendidikan selalu tumbuh positif. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia di Kabupaten Bulungan yang

lebih baik. Namun, capaian rata-rata lama sekolah Kabupaten Bulungan masih dibawah target wajib belajar yakni 12 tahun. Rata-rata siswa di Kabupaten Bulungan belum dapat mencapai masa kelulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat. Oleh karenanya, pemerintah daerah harus mendorong kinerja bidang pendidikan untuk lebih giat lagi. Salah satu caranya adalah dengan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya aspek pendidikan formal hingga lulus SMA.

Gambar 3.3 Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Bulungan, 2020-2023 (Tahun)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan. Pada tahun 2023, pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Bulungan mencapai Rp 10,20 juta per tahun. Selama periode 2020-2023, pengeluaran per kapita masyarakat meningkat sekitar Rp 1,08 juta atau 11,88 persen. Secara rata-rata selama periode 2020-2023 terjadi peningkatan 3,82 persen per tahun, dengan rincian pada tahun 2021 meningkat sebesar 3,31 persen, tahun 2022 meningkat sebesar 2,31 persen, dan pada tahun 2023 meningkat pesat sebanyak 5,85 persen.

Gambar 3.4 Perkembangan Pengeluaran Perkapita Kabupaten Bulungan, 2020-2023 (Ribu Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik

C. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Utara

Sesuai dengan fungsinya sebagai suatu indikator, IPM dihitung untuk melihat keterbandingan antar wilayah atau daerah. Hal ini dimaksudkan untuk melihat posisi relatif pembangunan manusia disuatu wilayah dibandingkan wilayah lainnya. Untuk itu, dengan membandingkan besaran IPM Kabupaten Bulungan dengan kabupaten/kota lain di Kalimantan Utara, maka dapat diperoleh gambaran mengenai posisi relatif pembangunan manusia di Kabupaten Bulungan dibandingkan wilayah lainnya.

Dengan melihat secara rinci terlihat bahwa terdapat tren positif pada besaran-besaran IPM masing-masing Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara, dimana terdapat peningkatan nilai IPM pada setiap tahunnya. Ini berarti bahwa secara umum terdapat peningkatan pada bidang pendidikan, kesehatan dan pendapatan. Perbedaan terdapat pada tingkat kelajuan peningkatan IPM. Karena IPM tersusun dari beberapa komponen tersebut, maka peningkatan yang berbeda pada ketiga komponen tersebut akan menjadi pembeda tingkat kelajuan peningkatan IPM.

Tabel 3.1 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara Tahun 2022-2023

Kabupaten/Kota (1)	IPM		Selisih IPM		Peringkat IPM	
	2022 (2)	2023 (3)	2022 (4)	2023 (5)	2022 (6)	2023 (7)
1 Malinau	73,55	74,00	0,43	0,45	2	2
2 Bulungan	72,56	73,20	0,29	0,64	3	3
3 Tana Tidung	69,45	70,06	0,86	0,61	4	4
4 Nunukan	67,88	68,43	0,70	0,55	5	5
5 Tarakan	76,75	77,61	0,45	0,86	1	1
Kalimantan Utara	72,21	72,88	0,64	0,67	23	23

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2023, pembangunan manusia di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara mengalami peningkatan. Capaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota cukup bervariasi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di Kalimantan Utara masih di Kota Tarakan sedangkan untuk IPM terendah masih di Kabupaten Nunukan. Jika dilihat berdasarkan statusnya, capaian pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Kalimantan Utara berbeda dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, terdapat tiga kabupaten/kota dengan status capaian pembangunan manusia “tinggi” yaitu Kota Tarakan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Bulungan. Sementara itu, dua kabupaten lainnya, Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan masih berstatus “sedang”. Namun Kabupaten Tana Tidung berhasil meningkatkan IPM hingga mencapai status capaian “tinggi” di tahun 2023.

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, umur harapan hidup saat lahir berkisar antara 73,11 tahun (Nunukan) hingga 74,24 tahun (Tarakan). Sementara pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah berkisar antara 12,39 tahun (Tana Tidung) hingga 14,21 tahun (Tarakan), dan rata-rata lama sekolah berkisar antara 8,26 tahun (Nunukan) hingga 10,36 tahun (Tarakan). Pengeluaran per kapita disesuaikan di tingkat kabupaten/kota berkisar antara 7,79 juta rupiah per tahun (Nunukan) hingga 11,99 juta rupiah per tahun (Tarakan). Kota Tarakan

selalu memiliki capaian tertinggi pada setiap dimensi penyusun IPM, sementara Kabupaten Nunukan hampir selalu memiliki capaian terendah.

Tabel 3.2 Komponen Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Malinau	73,25	13,34	9,43	10.708
2 Bulungan	73,83	13,04	9,21	10.205
3 Tana Tidung	73,47	12,39	9,04	8.386
4 Nunukan	73,11	12,68	8,26	7.787
5 Tarakan	74,24	14,21	10,36	11.992
Kalimantan Utara	73,54	13,20	9,34	9.734

Sumber: Badan Pusat Statistik



4

Ketenagakerjaan dan Pengangguran



“

Jumlah pengangguran di Kabupaten Bulungan meningkat menjadi sekitar 3.929 orang pada tahun 2023.

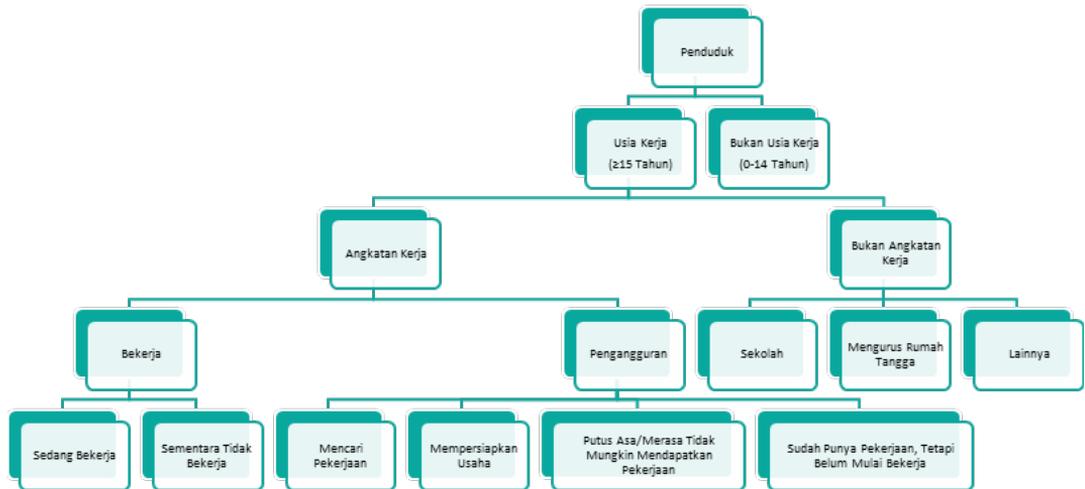
”

Ketenagakerjaan dan Pengangguran

A. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja

Dalam perencanaan pembangunan, data mengenai ketenagakerjaan memegang peranan penting. Tanpa data ketenagakerjaan, program pembangunan akan sulit dapat dilaksanakan. Ketersediaan data ketenagakerjaan yang semakin lengkap dan tepat akan memudahkan pemerintah dalam membuat rencana pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan khususnya di Kabupaten Bulungan dibutuhkan sekali data mengenai jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja baik dari aspek kualitas maupun kuantitas. Untuk memahami lebih dalam mengenai skema ketenagakerjaan, dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4.1 Diagram Ketenagakerjaan



Penduduk usia kerja (PUK) merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Bulungan. Penduduk usia kerja Kabupaten Bulungan pada Agustus 2023 sebanyak 120.366 orang, naik sebanyak 19.975 orang dibandingkan Agustus 2022. Sebagian besar penduduk usia kerja Kabupaten Bulungan merupakan angkatan kerja, yaitu 86.492 orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebesar 33.874 orang.

Komposisi angkatan kerja Kabupaten Bulungan pada Agustus 2023 terdiri dari 82.563 orang penduduk yang bekerja dan 3.929 orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2022, jumlah angkatan kerja Kabupaten Bulungan bertambah sebanyak 22.005 orang. Penduduk bekerja bertambah sebanyak 21.321 orang, sementara pengangguran bertambah sebanyak 684 orang.

Tabel 4.1 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Kabupaten Bulungan, Agustus 2022 - Agustus 2023

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2022	Agustus 2023	Perubahan Agt 2022-Agt 2023	
	orang	orang	orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penduduk Usia Kerja (PUK)	100.391	120.366	19.975	19,90
Angkatan Kerja	64.487	86.492	22.005	34,12
- Bekerja	61.242	82.563	21.321	34,81
- Pengangguran	3.245	3.929	684	21,08
Bukan Angkatan Kerja	35.904	33.874	-2.030	-5,65

Sumber: Badan Pusat Statistik

Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Bulungan Agustus 2023 mengalami peningkatan dibanding Agustus 2022. TPAK pada Agustus 2023 sebesar 71,86 persen, meningkat 7,62 persen poin dibanding Agustus 2022. Angka ini dapat diartikan bahwa dari 100 orang penduduk usia 15 tahun keatas terdapat sekitar 71-72 orang yang dapat bekerja sedangkan sisanya masuk ke dalam kategori bersekolah ataupun mengurus rumah tangga.

Tabel 4.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Bulungan, Agustus 2022 - Agustus 2023

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Agustus 2022	Agustus 2023	Perubahan Agt 2022-Agt 2023
	orang	orang	persen poin
(1)	(2)	(3)	(5)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	64,24	71,86	7,62
- Laki-Laki	83,48	84,50	1,02
- Perempuan	42,24	57,19	14,95

Sumber: Badan Pusat Statistik

Penduduk perempuan lebih banyak mengurus rumah tangga, atau bersekolah, atau melakukan kegiatan lainnya sebagai kegiatan utama sehari-hari. Hal ini dapat terlihat dari TPAK per jenis kelamin. Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2023, TPAK laki-laki sebesar 84,50 persen, lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan yang sebesar 57,19 persen. Dibandingkan Agustus 2022, TPAK laki-laki mengalami peningkatan sebesar 1,02 persen poin, sedangkan

TPAK perempuan mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni sebesar 14,95 persen poin. Hal ini sejalan dengan pola pikir di lingkungan yang masih menganggap perempuan lebih utama mengurus rumah tangga dibandingkan memiliki kegiatan lain di luar rumah.

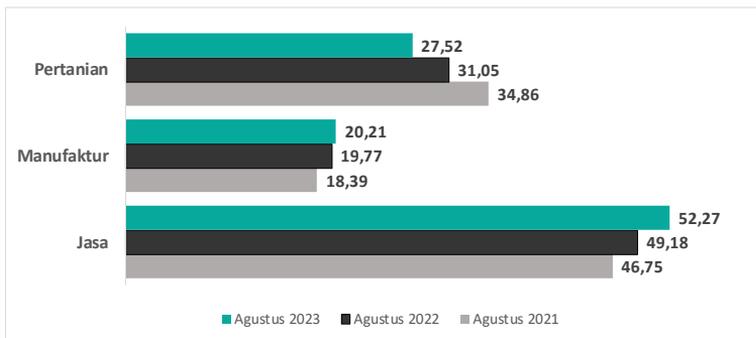
B. Karakteristik Penduduk yang Bekerja

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Untuk melihat struktur penduduk bekerja, maka perlu diperhatikan karakteristiknya. Karakteristik penduduk bekerja akan disajikan berdasarkan lapangan pekerjaan utama, status pekerjaan utama, dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

Komposisi penduduk yang bekerja pada setiap kategori lapangan pekerjaan dapat menggambarkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja untuk masing-masing kategori. Struktur penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan pada Agustus 2023 dibagi menjadi tiga kategori yaitu Pertanian, Manufaktur, dan Jasa. Sektor Jasa merupakan kategori lapangan pekerjaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja yaitu sebesar 52,27 persen, Sektor Pertanian menyerap sekitar 27,52 persen tenaga kerja, sedangkan Sektor Manufaktur hanya sekitar 20,21 persen.

Apabila dibandingkan dengan Agustus 2022, lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja yaitu Sektor Jasa (3,09 persen poin) dan Sektor Manufaktur (0,44 persen poin). Sementara itu, Sektor Pertanian mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja sebesar 3,53 persen poin.

Gambar 4.2 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Pekerjaan Utama di Kabupaten Bulungan (persen), Agustus 2021-Agustus 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik

Sementara itu untuk melihat kedudukan pekerja dapat dilihat dari status pekerjaannya. Status pekerjaan dibagi menjadi beberapa kategori. Pada Agustus 2023, penduduk bekerja di Kabupaten Bulungan paling banyak berstatus buruh/karyawan/pegawai, yaitu sebesar 46,30 persen, sementara paling sedikit berstatus berusaha dibantu pekerja tetap dan dibayar, yaitu sebesar 3,30 persen. Dibandingkan Agustus 2022, status berusaha sendiri dan buruh/karyawan/pegawai mengalami penurunan persentase masing-masing sebesar 3,88 persen poin dan 6,47 persen poin. Sementara itu, untuk status pekerjaan yang lainnya mengalami peningkatan persentase dengan peningkatan terbesar pada status pekerjaan berusaha dibantu pekerja tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, yaitu sebesar 5,78 persen poin.

Gambar 4.3 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Bulungan (persen), Agustus 2021-Agustus 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka dengan status berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar).

Pada Agustus 2023, penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 41.607 orang (50,39 persen), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 40.956 orang (49,61 persen). Dibandingkan Agustus 2022, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami penurunan sebesar 6,10 persen poin.

Gambar 4.4 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Kegiatan Formal/Informal di Kabupaten Bulungan (persen), Agustus 2021-Agustus 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Agustus 2023, penduduk bekerja di Kabupaten Bulungan masih didominasi oleh tamatan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD), yaitu sebesar 33,88 persen. Sementara itu, penduduk bekerja tamatan Perguruan Tinggi sebesar 17,56 persen.

Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan periode Agustus 2022 maupun Agustus 2021.

Dibandingkan dengan Agustus 2022, penduduk bekerja berpendidikan SMA Umum, SMA Kejuruan, dan SMP mengalami peningkatan persentase, dengan peningkatan terbesar pada tamatan SMA Kejuruan, yakni sebesar 2,93 persen poin. Sementara itu, penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan SD ke bawah dan Perguruan Tinggi mengalami penurunan persentase dengan penurunan terbesar pada pendidikan SD ke bawah, yakni sebesar 3,68 persen poin.

Gambar 4.5 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Bulungan, Agustus 2021-Agustus 2023

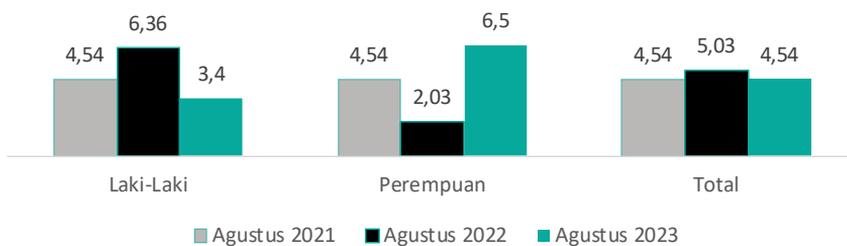


Sumber : Badan Pusat Statistik

C. Karakteristik Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT Kabupaten Bulungan hasil Sakernas Agustus 2023 sebesar 4,54 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar empat sampai lima orang penganggur. Pada Agustus 2023, TPT mengalami penurunan sebesar 0,49 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022, tetapi mengalami kesamaan dengan Agustus 2021.

Gambar 4.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bulungan (persen), Agustus 2021-Agustus 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik

Pada Agustus 2023, TPT laki-laki sebesar 3,40 persen, lebih rendah dibanding TPT perempuan yang sebesar 6,50 persen. TPT laki-laki Agustus 2023 mengalami penurunan sebesar 2,96 persen poin dibandingkan Agustus 2022, sedangkan TPT perempuan mengalami kenaikan sebesar 4,47 persen poin dibandingkan Agustus 2022.

Pada Agustus 2022, TPT tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 8,86 persen. Sementara TPT yang paling rendah adalah mereka dengan pendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 2,00 persen. Dibandingkan Agustus 2022, TPT kategori pendidikan yang mengalami kenaikan adalah SMA dan SMK yaitu masing-masing sebesar 1,75 persen poin dan 3,01 persen poin. Sedangkan SD, SMP, dan Perguruan Tinggi mengalami penurunan. Penurunan TPT terbesar ada pada tingkat pendidikan SD (termasuk SD ke bawah) yaitu sebesar 2,85 persen poin apabila dibandingkan dengan Agustus 2022.

Gambar 4.7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Bulungan (persen), Agustus 2021-Agustus 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik

D. Perbandingan Tingkat Pengangguran di Provinsi Kalimantan Utara

Di Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Tana Tidung memiliki Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tertinggi yakni 75,88 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa dari 100 orang penduduk berusia 15 tahun ke atas di Kabupaten Tana Tidung terdapat 75-76 orang yang dapat bekerja. Sedangkan, Kota Tarakan adalah daerah dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terendah yakni 66,14 persen.

Tabel 4.3 Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Jumlah Pengangguran
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Malinau	74,26	3,19	1.526
2 Bulungan	71,86	4,54	3.245
3 Tana Tidung	75,88	3,24	491
4 Nunukan	71,93	2,69	3.071
5 Tarakan	66,14	5,25	6.536
Kalimantan Utara	70,35	4,01	15.553

Sumber: Badan Pusat Statistik

Jika dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Kabupaten Nunukan memiliki TPT terendah yakni 2,69 persen yang dapat diartikan bahwa terdapat sekitar 2-3 orang pengangguran dari 100 orang yang termasuk sebagai angkatan kerja. Sebaliknya, Kota Tarakan adalah wilayah dengan persentase pengangguran tertinggi di Kalimantan Utara dengan 5,25 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa dari 100 penduduk angkatan kerja terdapat sekitar 5-6 orang yang menganggur. Begitu pula jika dilihat berdasarkan jumlahnya, Kota Tarakan memiliki jumlah pengangguran tertinggi di Kalimantan Utara yakni sebanyak 6.536 orang. Namun, untuk daerah dengan jumlah pengangguran terendah di Kalimantan Utara terletak di Kabupaten Tana Tidung yakni sebanyak 491 orang.



5

Perkembangan Indeks Harga Konsumen



“

Inflasi Tahun Kalender Kota Tanjung Selor pada Desember 2023 mencapai 2,38 persen dimana inflasi bulanan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 0,62 persen

”

Perkembangan Indeks Harga Konsumen

A. Indeks Harga Konsumen (IHK)

Perubahan harga (inflasi/deflasi) pada barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat dapat diukur melalui perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK merupakan salah satu indikator ekonomi penting yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan harga barang dan jasa yang dibayar oleh konsumen atau masyarakat, khususnya masyarakat perkotaan. Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang dan jasa secara umum. IHK juga sering digunakan untuk pendekatan Indeks Biaya Hidup (cost of living index/CoLI). Penentuan jumlah, jenis dan kualitas dalam paket komoditas barang dan jasa serta bobot timbangannya dalam IHK didasarkan pada Survei Biaya Hidup (SBH).

IHK mengukur perubahan pengeluaran/biaya barang dan jasa (paket komoditas) yang biasa dibeli oleh mayoritas rumah tangga dari waktu ke waktu. Dengan kualitas dan kuantitas paket komoditas yang dianggap konstan pada tahun dasar, indeks tersebut semata-mata mencerminkan perubahan harga dan didesain sebagai suatu ukuran dari dampak perubahan harga pada pembelian barang dan jasa. Nilai IHK ini tidak dapat secara langsung menunjukkan perubahan harga komoditas untuk kebutuhan hidup layak pekerja di suatu daerah dikarenakan metode dan paket komoditas yang lebih sederhana. Meskipun demikian informasi dari IHK sangat membantu memberikan gambaran pergerakan harga kebutuhan hidup layak yang terjadi di pasar.

Penghitungan IHK pada tahun 2023 dilaksanakan di 90 kota inflasi. Di Provinsi Kalimantan Utara, terdapat dua kota inflasi yakni Kota Tarakan dan Kota Tanjung Selor. Pemilihan Tanjung Selor sebagai salah satu kota inflasi didasari oleh status wilayah Tanjung Selor yang merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Utara.

IHK secara universal telah diterima sebagai suatu indikator umum dari inflasi karena membantu para pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi sumber-sumber inflasi sehingga dapat merumuskan kebijakan ekonomi khususnya ukuran anti-inflasi. IHK juga digunakan untuk menyesuaikan data ekonomi yang relevan dari series nilai nominal menjadi series harga konstan dalam rangka mengestimasi pertumbuhan sebenarnya/riil pendapatan nasional dan volume penjualan eceran. Selain itu IHK juga bisa digunakan sebagai deflator PDB/PDRB.

Kegunaan utama lainnya dari IHK adalah untuk menilai daya beli uang. Pada saat harga naik, nilai sebenarnya dari uang atau daya beli menurun sehingga hanya dapat membeli kuantitas yang lebih sedikit dari barang atau jasa yang sama. Hal lain yang berkaitan dengan IHK dan inflasi adalah kenyataan bahwa stabilitas harga juga merupakan barometer stabilitas pertumbuhan ekonomi riil, karena inflasi yang dapat dikendalikan menjamin peningkatan daya beli masyarakat dari waktu ke waktu. Tetapi harga-harga di Indonesia (termasuk di Kota Tanjung Selor) sangat fluktuatif. Pada waktu-waktu tertentu, harga-harga kebutuhan pokok naik dan turun tergantung pasokan (supply). Dengan permintaan yang tidak berubah, maka demand pull inflation dapat terjadi. Tetapi karena sebagian industri pengolahan juga menggunakan bahan baku impor, maka imported inflation juga merupakan gejala yang selalu mungkin terjadi di Kota Tanjung Selor. Selain itu kenaikan harga juga bisa disebabkan oleh adanya kenaikan biaya produksi di dalam negeri (cost push inflation), misalnya kenaikan harga

BBM.

Di sisi lain, bagi pemegang otoritas moneter terdapat sebuah teori inflasi klasik yang berpendapat bahwa tingkat harga terutama ditentukan oleh jumlah uang beredar, yang dapat dijelaskan melalui hubungan antara nilai uang dengan jumlah uang serta nilai uang dan harga. Bila jumlah uang bertambah lebih cepat dari pertambahan barang maka nilai uang akan merosot dan ini sama dengan kenaikan harga. Jadi menurut teori klasik ini, inflasi berarti terlalu banyak uang beredar atau terlalu banyak kredit dibandingkan dengan volume transaksi maka obatnya adalah membatasi jumlah uang beredar dan kredit.

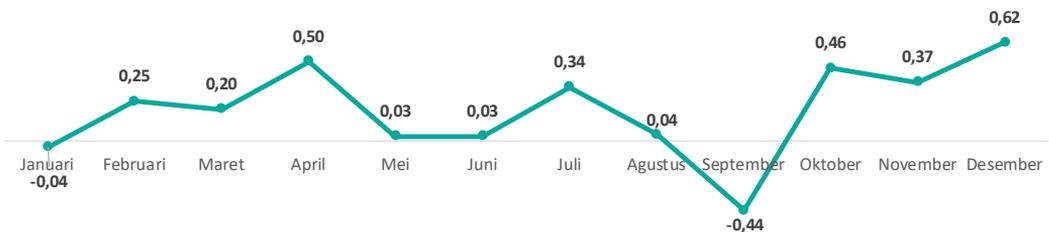
Pengaruh inflasi bagi masyarakat bisa positif dan negatif, tergantung parah atau tidaknya inflasi. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat masyarakat lebih bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Sebaliknya, jika inflasi itu parah, yaitu pada saat inflasi tak terkendali (hiperinflasi) keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu, masyarakat menjadi tidak bersemangat kerja, menabung atau mengadakan investasi dan produksi karena harga meningkat dengan cepat, para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau karyawan swasta serta kaum buruh akan kewalahan menanggung dan mengimbangi harga sehingga hidup mereka menjadi semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu.

Secara umum inflasi akan mengurangi daya beli seseorang yang memiliki pendapatan tetap, selain itu juga menyebabkan masyarakat enggan untuk menabung karena nilai mata uang semakin menurun. Bagi produsen, pengaruh inflasi menguntungkan jika pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi, sehingga produsen akan terdorong untuk melipatgandakan produksinya. Namun, sebaliknya inflasi merugikan jika kenaikan biaya produksi lebih tinggi dari keuntungan yang diperoleh, maka produsen enggan untuk meneruskan produksinya. Selain itu jika inflasi suatu daerah cukup tinggi hal tersebut mencerminkan ketidakstabilan harga-harga barang dan jasa yang bisa disebabkan oleh sisi produksi ataupun distribusi yang ada. Oleh sebab itu, peran strategis pemerintah daerah sangat besar dalam pengendalian laju inflasi agar kestabilan harga dapat tercapai.

B. Perkembangan Indeks Harga Konsumen di Tanjung Selor Tahun 2023

Inflasi Kota Tanjung Selor selama bulan Januari hingga Desember 2023 (inflasi kalender Desember 2023) mencapai 2,38 persen. Selama tahun 2023 untuk Kota Tanjung Selor terjadi sepuluh kali inflasi dan dua kali deflasi. Inflasi bulanan tertinggi terjadi di bulan Desember yaitu 0,62 persen dan mengalami deflasi terendah pada bulan September sebesar -0,44 persen. Untuk lebih rincinya, perkembangan inflasi bulanan dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 5.1 Perkembangan Inflasi Bulanan Kota Tanjung Selor Tahun 2023 (persen)



Secara umum, selama tahun 2023 Kota Tanjung Selor terus mengalami inflasi setiap bulannya kecuali pada bulan Januari dan September yang mengalami deflasi. Inflasi tertinggi pada bulan Desember 2023 dipengaruhi oleh kenaikan indeks harga pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 2,23 persen, kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,06 persen, kelompok Informasi dan Komunikasi sebesar 0,01 persen, dan kelompok Kesehatan sebesar 0,02 persen.

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau mengalami kenaikan yang signifikan disebabkan adanya kenaikan pada harga barang-barang pokok seperti cabai rawit, bawang merah, ikan bandeng, cabai merah dan tomat.

Pada tahun 2023, Kota Tanjung Selor kembali memenuhi target inflasi pemerintah $3\pm 1\%$ dengan inflasi tahun kalender sebesar 2,38 persen setelah tahun lalu mencapai inflasi tahun kalender sebesar 7,98 persen, tertinggi selama ditetapkan sebagai salah satu kota inflasi sejak 2020. Hal ini menggambarkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi dengan berbagai kebijakan yang tepat sasaran. Pemerintah daerah mampu mengembalikan kestabilan perekonomian yang disebabkan oleh adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kenaikan harga minyak goreng secara signifikan pada tahun 2022.

Tabel 5.1 Inflasi dan Andil Menurut Kelompok Pengeluaran Kota Tanjung Selor, 2023

Kelompok Pengeluaran	Inflasi Tahun Kalender 2023	Andil Tahun Kalender 2023
(1)	(3)	(4)
INFLASI TANJUNG SELOR	2,38	2,38
1 Makanan, Minuman dan Tembakau	6,02	1,70
2 Pakaian dan Alas Kaki	0,28	0,02
3 Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	1,02	0,23
4 Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	-1,65	-0,10
5 Kesehatan	4,73	0,10
6 Transportasi	2,28	0,31
7 Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-0,21	-0,01
8 Rekreasi, Olahraga dan Budaya	0,33	0,00
9 Pendidikan	0,00	0,00
10 Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,66	0,04
11 Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	1,58	0,10

Sumber : Badan Pusat Statistik

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa sebanyak sembilan kelompok pengeluaran mengalami inflasi dan dua kelompok mengalami deflasi selama tahun 2023. Inflasi dan andil tertinggi selama tahun 2023 terdapat pada kelompok pengeluaran Makanan, Minuman dan Tembakau. Komoditas yang menyumbang inflasi tersebut adalah beras, cabai rawit, angkutan udara, bahan bakar rumah tangga, dan rokok kretek filter.

Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi terdalam adalah kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan harga pada komoditas sabun detergen bubuk/cair, sabun cuci piring, dan pengharum cucian/pelembut. Penurunan harga ini berhubungan dengan adanya promo yang sering diberikan oleh swalayan dan minimarket.

Untuk melihat pengaruh kelompok pengeluaran terhadap inflasi dengan lebih rinci, dapat dilihat melalui perkembangan inflasi masing-masing kelompok pengeluaran dan komoditas dengan andil dominan per bulan selama tahun 2023.

Gambar 5.2 Inflasi Bulanan Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau Kota Tanjung Selor, Januari - Desember 2023 (persen)



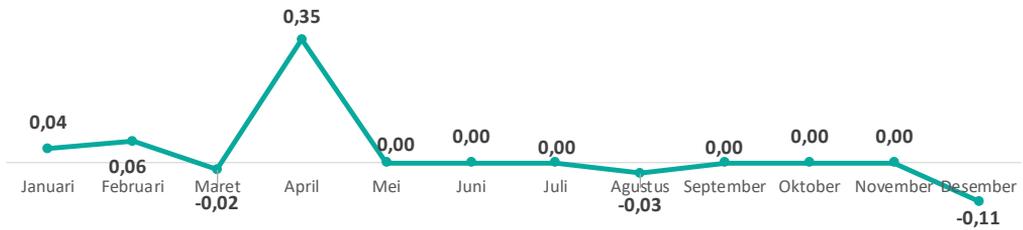
Sumber : Survei Harga Konsumen, Badan Pusat Statistik

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau mulai Januari sampai dengan Desember 2023 ini mengalami inflasi sebesar 6,02 persen atau dapat diartikan bahwa rata-rata harga bahan makanan, minuman, dan tembakau meningkat 6,02 persen dibandingkan dengan rata-rata harga pada Desember 2022. Sepanjang tahun 2023, secara bulanan kelompok ini mengalami peningkatan tertinggi pada bulan Desember sebesar 2,23 persen. Adapun komoditas yang memiliki andil besar dalam inflasi kelompok ini adalah Cabai Rawit, Bawang Merah, Ikan Bandeng, Cabai Merah, dan Tomat. Selain di bulan Maret, peningkatan tertinggi juga terjadi pada bulan Oktober. Inflasi kelompok ini pada bulan Oktober sebesar 1,49 persen yang disebabkan oleh adanya kenaikan harga pada komoditas beras yang juga terjadi secara nasional.

Selain peningkatan harga yang tinggi, pada periode 2023 kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau juga pernah mengalami penurunan harga yang rendah pada bulan September. Inflasi bulan September pada kelompok ini sebesar -1,69 persen yang dipengaruhi oleh turunnya harga komoditas Daging Ayam Ras, Bawang Merah, Cabai Rawit, Ikan Bandeng dan Cabai Merah.

Kelompok Pakaian dan Alas Kaki jarang cenderung tidak mengalami perubahan harga yang signifikan. Selama tahun 2023, perubahan harga pada kelompok ini tidak pernah lebih dari satu persen baik meningkat atau menurun. Kelompok ini mengalami inflasi tertinggi pada bulan April sebesar 0,35 persen yang dipengaruhi oleh adanya kenaikan harga pada komoditas seragam sekolah dan celana panjang jeans.

Gambar 5.3 Inflasi Bulanan Kelompok Pakaian dan Alas Kaki Kota Tanjung Selor, Januari - Desember 2023 (persen)

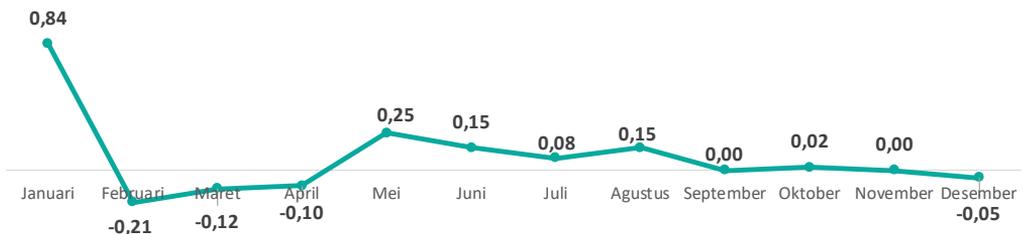


Sumber : Survei Harga Konsumen, Badan Pusat Statistik

Untuk kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga secara rata-rata cenderung berfluktuasi di setiap bulannya dan hingga pada akhir 2023 mengalami total inflasi sebesar 1,02 persen selama tahun 2023. Adapun dari Januari hingga Desember, kelompok ini mengalami inflasi tertinggi pada bulan Januari sebesar 0,84 persen yang kemudian terjadi penurunan harga pada tiga bulan setelahnya.

Inflasi tertinggi yang terjadi di bulan Januari 2023 dipengaruhi oleh perubahan indeks harga konsumen untuk komoditas bahan bakar rumah tangga seperti tabung gas dan minyak tanah. Selain itu di perubahan harga pada kelompok ini disebabkan oleh naik turunnya harga bahan bangunan seperti besi beton, cat tembok, semen, dan lain sebagainya.

Gambar 5.4 Inflasi Bulanan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga Kota Tanjung Selor, Januari - Desember 2023 (persen)



Sumber : Survei Harga Konsumen, Badan Pusat Statistik

Selama tahun 2023, kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga mengalami deflasi sebesar -1,65 persen, inflasi tahun kalender terendah selama tahun 2023. Secara umum, kelompok ini terus mengalami fluktuasi harga dari bulan ke bulan. Dari bulan Januari hingga Desember 2023, kelompok ini mengalami inflasi tertinggi di bulan April sebesar 0,40 persen dan deflasi terendah di bulan Maret sebesar -0,69 persen.

Adapun barang dan jasa yang dominan memberikan sumbangan inflasi pada bulan April adalah bola lampu, lampu tl/neon dan penyegar ruangan. Sedangkan barang dan jasa yang dominan memberikan sumbangan deflasi pada bulan Maret adalah sabun detergen bubuk/cair, pengharum cucian/pelembut, sabun cair/cuci piring, dan pembersih lantai.

Gambar 5.5 Inflasi Bulanan Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga Kota Tanjung Selor, Januari - Desember 2023 (persen)

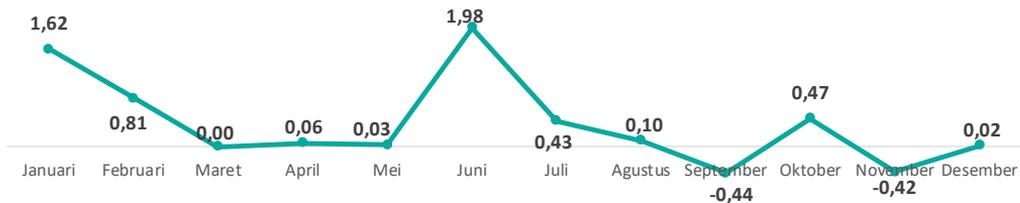


Sumber : Survei Harga Konsumen, Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2023, kelompok Kesehatan mengalami perubahan harga yang berfluktuasi setiap bulannya dimana dua kali mengalami deflasi, sembilan kali mengalami inflasi, dan satu kali rata-rata harga di kelompok ini cenderung stabil. Hingga akhir tahun 2023, kelompok Kesehatan mengalami inflasi tahun kalender sebesar 4,73 persen.

Selama Januari sampai Desember 2023, kelompok Kesehatan mengalami inflasi tertinggi di bulan Juni sebesar 1,98 persen. Kenaikan harga di bulan April dipengaruhi oleh adanya kenaikan pada harga obat dengan resep. Sedangkan di bulan September, kelompok ini mengalami deflasi terendah yakni sebesar -0,44 persen yang dipengaruhi oleh adanya penurunan rata-rata harga untuk komoditas obat dengan resep.

Gambar 5.6 Inflasi Bulanan Kelompok Kesehatan Kota Tanjung Selor, Januari - Desember 2023 (persen)

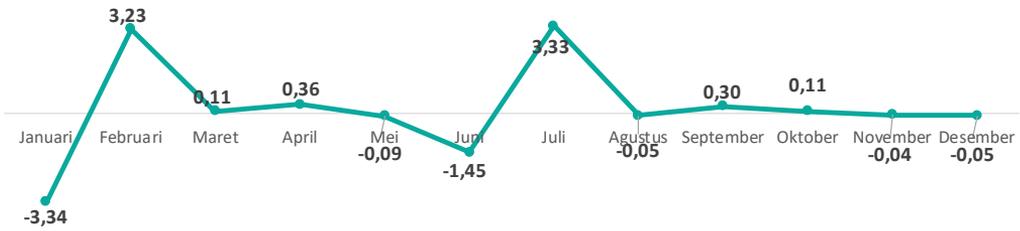


Sumber : Survei Harga Konsumen, Badan Pusat Statistik

Seperti kelompok-kelompok lainnya, kelompok Transportasi juga mengalami fluktuasi harga di setiap bulannya. Sepanjang tahun 2023, kelompok ini mengalami enam kali inflasi dan enam kali deflasi hingga pada Desember 2023 inflasi tahun kalendernya mencapai 2,28 persen.

Inflasi kelompok Transportasi tertinggi terjadi pada bulan Juli yang mencapai 3,33 persen. Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan harga pada tarif angkutan udara, solar dan bensin. Kemudian, deflasi terendah terjadi pada bulan Januari sebesar -3,34 persen yang juga disebabkan oleh penurunan harga pada tarif angkutan udara, solar dan bensin. Pada tahun 2023, pemerintah beberapa kali melakukan penyesuaian harga subsidi bahan bakar minyak (BBM) sehingga menyebabkan kelompok Transportasi mengalami fluktuasi harga.

Gambar 5.7 Inflasi Bulanan Kelompok Transportasi Kota Tanjung Selor, Januari - Desember 2023 (persen)



Sumber : Survei Harga Konsumen, Badan Pusat Statistik

Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan merupakan salah satu kelompok pengeluaran yang pergerakan harganya tidak sefluktuatif kelompok pengeluaran lainnya. Selama tahun 2023, kelompok ini mengalami inflasi di empat bulan, deflasi di tiga bulan, dan lima bulan lainnya tidak mengalami perubahan harga. Dari bulan Januari hingga Desember 2023, kelompok ini mengalami deflasi sebesar -0,21 persen. Hal ini membuat kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan menjadi salah satu dari dua kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi pada inflasi tahun kalender bulan Desember 2023.

Selama tahun 202, kelompok ini mengalami inflasi tertinggi sebesar 0,04 persen pada bulan September. Inflasi pada bulan September ini dipengaruhi oleh adanya kenaikan harga pulsa ponsel. Namun, kelompok ini juga mengalami deflasi yang cukup dalam pada bulan Februari sebesar -0,19 persen. Deflasi yang cukup dalam pada bulan Februari ini disebabkan oleh adanya penurunan harga laptop dan telepon seluler. Penurunan harga laptop dan telepon seluler ini wajar terjadi karena dengan tipe kualitas yang sama harga telepon seluler cenderung untuk berangsur-angsur turun seiring dengan adanya produk atau tipe kualitas yang lebih baru.

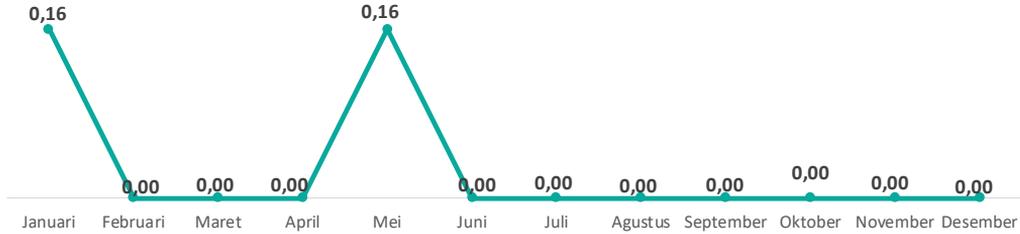
Gambar 5.8 Inflasi Bulanan Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan Kota Tanjung Selor, Januari - Desember 2023 (persen)



Sumber : Survei Harga Konsumen, Badan Pusat Statistik

Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2023 mengalami inflasi hanya di dua bulan sedangkan sisanya menunjukkan bahwa tidak ada perubahan harga. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Januari dan Mei dengan nilai sebesar 0,16 persen. Inflasi ini terjadi disebabkan oleh adanya perubahan harga pada subkelompok koran, buku, dan perlengkapan sekolah seperti harga buku tulis bergaris dan pensil hitam. Selain itu, secara umum rata-rata harga di kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Gambar 5.9 Inflasi Bulanan Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya Kota Tanjung Selor, Januari - Desember 2023 (persen)



Sumber : Survei Harga Konsumen, Badan Pusat Statistik

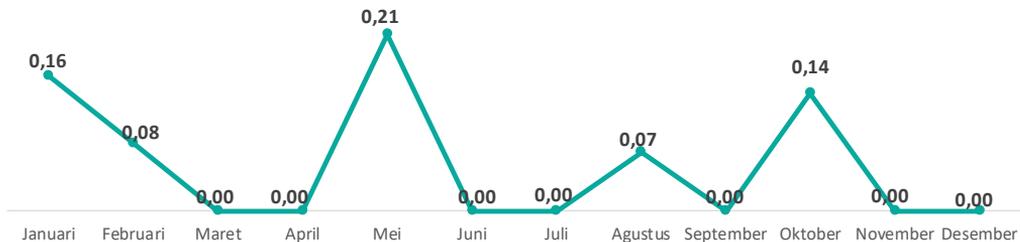
Kelompok pendidikan adalah salah satu kelompok pengeluaran yang jarang mengalami perubahan harga dan hampir tidak pernah mengalami deflasi. Perubahan harga yang terjadi di kelompok Pendidikan biasanya bertepatan pada masa masuk tahun ajaran baru sekolah. Namun, di Kota Tanjung Selor pada tahun 2023 kelompok Pendidikan tidak mengalami perubahan harga sehingga dapat dikatakan bahwa biaya pendidikan di Kota Tanjung Selor cenderung stabil pada tahun 2023.

Gambar 5.10 Inflasi Bulanan Kelompok Pendidikan Kota Tanjung Selor, Januari - Desember 2023 (persen)



Sumber : Survei Harga Konsumen, Badan Pusat Statistik

Gambar 5.11 Inflasi Bulanan Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran Kota Tanjung Selor, Januari - Desember 2023 (persen)

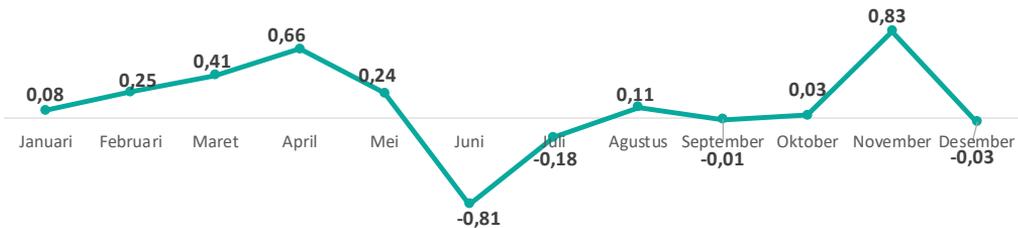


Sumber : Survei Harga Konsumen, Badan Pusat Statistik

Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran pada akhir tahun 2023 mengalami inflasi tahun kalender sebesar 0,66 persen. Perubahan harga pada kelompok ini biasanya

berkaitan erat dengan kenaikan harga bahan baku makanan/minuman yang ada pada kategori Makanan, Minuman, dan Tembakau. Selama tahun 2023, kelompok ini mengalami inflasi di empat bulan dan cenderung stabil di bulan-bulan lainnya. Inflasi tertinggi terjadi di bulan Mei sebesar 0,21 persen yang dipengaruhi oleh perubahan indeks harga konsumen pada komoditas ayam bakar dan roti bakar.

Gambar 5.12 Inflasi Bulanan Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya Kota Tanjung Selor, Januari - Desember 2023 (persen)



Sumber : Survei Harga Konsumen, Badan Pusat Statistik

Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya selama tahun 2023 secara rata-rata terus mengalami fluktuasi harga di setiap bulannya. Hal ini terlihat dari perubahan indeks harga konsumen yang naik turun. Selama bulan Januari hingga Desember, kelompok ini mengalami inflasi sebesar 1,58 persen.

Inflasi tertinggi terjadi di bulan November sebesar 0,83 persen. Adapun di bulan November ini, inflasi pada kelompok ini dipengaruhi oleh adanya kenaikan harga pada komoditas emas perhiasan, sabun mandi cair, dan shampo. Sedangkan deflasi terdalam terjadi di bulan Juni sebesar -0,81 persen yang dipengaruhi oleh adanya penurunan harga pada komoditas emas perhiasan, sabun mandi, sabun mandi cair, shampo, deodoran dan popok bayi sekali pakai.

C. Perbandingan Indeks Harga Konsumen Antar Kota

Tanjung Selor termasuk kedalam salah satu kota dari 90 kota pantauan Indeks Harga Konsumen di Indonesia. Di Kalimantan Utara, kota yang masuk menjadi kota pantauan inflasi adalah Kota Tanjung Selor dan Kota Tarakan. Sedangkan di Pulau Kalimantan, terdapat 12 kota pantauan inflasi yang tersebar di masing-masing provinsi.

Selama tahun 2022, Tanjung Selor pernah menjadi kota dengan inflasi tahun ke tahun tertinggi se Indonesia yakni pada bulan Oktober dan November. Hal ini disebabkan oleh tingginya kenaikan harga tiket angkutan udara di Tanjung Selor. Selain itu, beberapa kondisi seperti adanya perbaikan jalan lintas provinsi Kaltim-Kaltara dan semakin dangkalnya sungai Kayan menyebabkan terhambatnya arus distribusi barang-barang impor terutama untuk komoditas bahan makanan sehingga mempengaruhi stok komoditas makanan di pasar. Stok pasar yang tidak mampu mencukupi kebutuhan masyarakat menyebabkan terjadi kenaikan harga-harga komoditas.

Hingga akhir tahun 2022, Tanjung Selor memiliki tingkat inflasi tahun kalender sebesar 7,98 persen. Angka ini merupakan inflasi tahun kalender tertinggi ketiga di Indonesia. Namun, pada tahun 2023 pemerintah daerah Kabupaten Bulungan berhasil menekan angka inflasi hingga mencapai 2,38 persen untuk inflasi tahun kalendernya. Dengan angka inflasi tahun kalender

ini, Tanjung Selor berada di peringkat 64 dari 90 kota inflasi di Indonesia dan peringkat 8 dari 12 kota inflasi di Pulau Kalimantan. Untuk di Provinsi Kalimantan Utara, Kota Tarakan memiliki inflasi tahun kalender sebesar 2,46 persen.

Adapun lima kota dengan inflasi tahun kalender tertinggi di tahun 2023 adalah Kabupaten Sumenep dengan 5,08 persen, Kabupaten Merauke dengan 4,67 persen, Kota Ternate dengan 4,41 persen, Kabupaten Luwuk dengan 4,35 persen, dan Kabupaten Singaraja dengan 4,31 persen.

Sebaliknya, lima kota pantauan inflasi yang berhasil menahan laju inflasinya dan tercermin dari inflasi tahun kalender yang rendah adalah Kota Lhokseumawe sebesar 1,56 persen, Kota Banda Aceh sebesar 1,53 persen, Kabupaten Tembilahan sebesar 1,53 persen, Kabupaten Meulaboh sebesar 1,42 persen, dan Kota Bandung sebesar 0,63 persen.

bangga
melayani
bangsa